



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA  
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 185);
  7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 264 Tahun 2005)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
  6. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
  7. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
  8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah.
  9. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, dan darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  12. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah bagian laba dari badan usaha milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
  13. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
  14. Belanja Pegawai adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

15. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
16. Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
18. Belanja Operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
19. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
20. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
21. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rencana Pendapatan Daerah, rencana Belanja Daerah, dan rencana Pembiayaan Daerah yang terinci sampai subrincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
23. Daerah adalah Kota Pariaman.
24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
25. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp665.680.718.682,00 (enam ratus enam puluh lima milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:
- Pendapatan Daerah Rp665.680.718.682,00 (enam ratus enam puluh lima milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
  - Belanja Daerah sebesar Rp665.680.718.682,00 (enam ratus enam puluh lima milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah); dan
  - Pembiayaan neto sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp57.049.327.694,00 (lima puluh tujuh milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Pendapatan Transfer sebesar Rp608.631.390.988,00 (enam ratus delapan milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- Pajak Daerah sebesar Rp21.173.192.141,00 (dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah);



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

- b. Retribusi Daerah sebesar Rp4.392.239.800,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp11.331.512.753,00 (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah); dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp20.152.383.000,00 (dua puluh milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- a. transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp577.354.185.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
  - b. transfer antar Daerah sebesar Rp31.277.205.988,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Belanja Operasional sebesar Rp528.030.193.735,93 (lima ratus dua puluh delapan milyar tiga puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen);
- b. Belanja Modal sebesar Rp47.545.787.603,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
- d. Belanja Transfer Rp88.604.737.343,07 (delapan puluh delapan milyar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah tujuh sen).

Pasal 6

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai sebesar Rp363.104.390.350,37 (tiga



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

- ratus enam puluh tiga milyar seratus empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah tiga puluh tujuh sen);
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp158.546.700.385,56 (seratus lima puluh delapan milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh enam sen);
  - c. Belanja Hibah sebesar Rp6.379.103.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah); dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal peralatan dan mesin sebesar Rp6.236.145.403,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah);
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.120.051.000,00 (tujuh milyar Seratus dua puluh juta lima puluh satu ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp33.654.559.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  - d. Belanja Modal aset tetap lainnya sebesar Rp436.032.200,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
  - e. Belanja Modal aset lainnya sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil sebesar Rp2.556.543.194,07 (dua milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah tujuh sen); dan
  - b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp86.048.194.149,00 (delapan puluh enam milyar empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Pariaman ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- b. Lampiran II memuat rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
- e. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran VII memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran IX daftar memuat nama penerima, alamat, dan





WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

- besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran X memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kota;
  - k. Lampiran XI memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah desa;
  - l. Lampiran XII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah; dan
  - m. Lampiran XIII memuat rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 10

Penjabaran APBD dalam Peraturan Wali Kota ini harus ditindaklanjuti dengan pembentukan DPA SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepengetahuan Pejabat Wali Kota Pariaman.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



  
ROBERIA

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



  
MURSALIM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 18



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

LAMPIRAN I  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN DAERAH,  
BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp57,049,327,694.00
4.1.01	Pajak Daerah	Rp21,173,192,141.00
4.1.01.09	Pajak Reklame	Rp150,000,000.00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Rp150,000,000.00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Rp150,000,000.00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp2,300,000,000.00
4.1.01.15.01	PBBP2	Rp2,300,000,000.00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	Rp2,300,000,000.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp4,000,000,000.00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	Rp4,000,000,000.00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	Rp4,000,000,000.00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Rp6,650,000,000.00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	Rp1,500,000,000.00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	Rp1,500,000,000.00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	Rp5,000,000,000.00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Rp5,000,000,000.00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	Rp100,000,000.00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	Rp100,000,000.00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	Rp30,000,000.00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	Rp30,000,000.00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	Rp20,000,000.00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	Rp20,000,000.00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp5,657,674,888.00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	Rp5,657,674,888.00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	Rp5,657,674,888.00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp2,415,517,253.00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	Rp2,415,517,253.00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	Rp2,415,517,253.00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp4,392,239,800.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	Rp1,593,004,800.00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp978,004,800.00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Rp278,004,800.00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Rp700,000,000.00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Rp350,000,000.00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Rp350,000,000.00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp265,000,000.00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp265,000,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	Rp2,499,235,000.00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp300,000,000.00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Rp300,000,000.00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp39,075,000.00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	Rp39,075,000.00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Rp300,000,000.00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Rp300,000,000.00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	Rp250,000,000.00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	Rp250,000,000.00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Rp925,000,000.00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Rp925,000,000.00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Rp391,000,000.00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Rp391,000,000.00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp294,160,000.00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp294,160,000.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	Rp300,000,000.00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Rp300,000,000.00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Rp300,000,000.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp11,331,512,753.00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	Rp11,331,512,753.00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	Rp11,331,512,753.00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	Rp11,331,512,753.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp20,152,383,000.00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	Rp530,000,000.00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	Rp530,000,000.00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	Rp530,000,000.00
4.1.04.05	Jasa Giro	Rp2,000,000,000.00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	Rp2,000,000,000.00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	Rp2,000,000,000.00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	Rp2,500,000,000.00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	Rp2,500,000,000.00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	Rp2,500,000,000.00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Rp2,250,000,000.00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Rp2,250,000,000.00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Rp2,250,000,000.00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	Rp12,795,883,000.00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp12,795,883,000.00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp12,795,883,000.00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Rp71,500,000.00
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Rp71,500,000.00
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Rp71,500,000.00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Rp5,000,000.00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Rp5,000,000.00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Rp5,000,000.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp608,631,390,988.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp577,354,185,000.00
4.2.01.05	Dana Desa	Rp41,027,669,000.00
4.2.01.05.01	Dana Desa	Rp41,027,669,000.00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	Rp41,027,669,000.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	Rp6,963,163,000.00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Rp6,963,163,000.00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Rp6,963,163,000.00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp9,898,551,000.00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	Rp6,642,339,000.00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	Rp1,065,519,000.00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	Rp5,576,820,000.00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	Rp1,631,578,000.00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	Rp206,581,000.00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	Rp456,069,000.00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp30,343,000.00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	Rp938,585,000.00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	Rp1,624,634,000.00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	Rp1,624,634,000.00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp425,165,056,000.00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	Rp330,312,834,000.00
4.2.01.08.01.0001	DAU	Rp330,312,834,000.00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	Rp94,852,222,000.00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Rp3,200,000,000.00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Rp27,710,386,000.00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Rp28,279,706,000.00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Rp22,797,283,000.00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Rp12,864,847,000.00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp94,299,746,000.00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	Rp27,054,849,000.00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Rp349,970,000.00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Rp750,570,000.00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Rp0.00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Rp909,909,000.00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Rp24,836,898,000.00
4.2.01.09.01.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Rp0.00
4.2.01.09.01.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Rp0.00
4.2.01.09.01.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	Rp0.00
4.2.01.09.01.0069	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB	Rp207,502,000.00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	Rp67,244,897,000.00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Rp13,812,100,000.00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Rp646,500,000.00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	Rp34,494,122,000.00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Rp355,500,000.00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Rp1,890,600,000.00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Rp1,295,000,000.00
4.2.01.09.02.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	Rp500,000,000.00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Rp0.00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Rp2,347,288,000.00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp505,690,000.00
4.2.01.09.02.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	Rp0.00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Rp5,908,697,000.00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Rp371,410,000.00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Rp5,117,990,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp31,277,205,988.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	Rp31,277,205,988.00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp31,277,205,988.00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp18,325,939,020.00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp188,405,389.00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp12,762,861,579.00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp528,030,193,735.93
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp363,104,390,350.37
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp216,441,626,583.48
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp159,793,145,406.21
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp137,225,836,104.93
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp22,567,309,301.28
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp16,528,610,507.29
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp13,266,202,529.80
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp3,262,407,977.49
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp3,829,163,627.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp3,829,163,627.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp11,958,899,901.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp10,556,051,146.00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp1,402,848,755.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp3,246,502,427.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp2,022,113,452.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp1,224,388,975.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp9,994,918,370.60
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp7,909,887,877.20
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp2,085,030,493.40
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp765,957,752.44
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp685,141,841.44
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp80,815,911.00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 14 -

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp3,966,876.05
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp2,958,491.34
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp1,008,384.71
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp8,884,916,139.46
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp7,314,907,840.55
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp1,570,008,298.91
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp363,587,315.11
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp291,983,151.53
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp71,604,163.58
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp1,071,958,261.32
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp854,145,762.58
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp217,812,498.74
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp123,390,430,339.17
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp51,915,477,879.86
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp50,383,608,049.92
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp1,531,869,829.94
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	Rp251,285,803.30
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	Rp251,285,803.30
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp5,458,139,038.89
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp5,458,139,038.89
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Rp2,088,208,253.49
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	Rp2,088,208,253.49
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp25,510,043,315.77
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp24,788,817,196.37
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp721,226,119.40
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp38,167,276,047.86
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	Rp1,058,659,607.05
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	Rp558,111,990.00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Rp12,600,000.00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp2,730,000.00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp75,600,000.00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	Rp25,000,000.00
5.1.01.02.06.0055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Rp13,415,609.00
5.1.01.02.06.0060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Rp750,000.00
5.1.01.02.06.0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp1,250,000.00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Rp34,494,122,000.00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Rp355,500,000.00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Rp764,334,007.00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp805,202,834.81
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Rp6,340,414,983.00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	Rp458,059,350.00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	Rp458,059,350.00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Rp37,439,087.00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Rp37,439,087.00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 15 -

KODE 1	URAIAN 2	JUMLAH 3
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Rp50,817,233.00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Rp50,817,233.00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	Rp45,805,935.00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	Rp45,805,935.00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Rp664,186,057.00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Rp664,186,057.00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Rp85,825,913.00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Rp85,825,913.00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Rp29,400,000.00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Rp29,400,000.00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1,512,000,000.00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1,512,000,000.00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp378,000,000.00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp378,000,000.00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp762,944.00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp762,944.00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp916,118,464.00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	Rp44,564,520.00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	Rp1,084,496.00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	Rp3,263,288.00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	Rp867,206,160.00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp2,142,000,000.00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp2,142,000,000.00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp20,000,000.00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp20,000,000.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Rp258,290,792.72
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp96,727,982.72
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp96,727,982.72
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp6,116,000.00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp6,116,000.00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp118,280,000.00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp118,280,000.00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp9,069,400.00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp9,069,400.00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp971,170.00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp971,170.00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp2,240.00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp2,240.00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Rp9,279,840.00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Rp9,279,840.00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp131,040.00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp131,040.00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Rp393,120.00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Rp393,120.00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp0.00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp0.00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp0.00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp0.00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp0.00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Rp0.00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp0.00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp0.00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp0.00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 16 -

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp0.00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	Rp17,320,000.00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Rp2,400,000.00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp520,000.00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp14,400,000.00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Rp410,880,000.00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	Rp110,880,000.00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	Rp110,880,000.00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Rp300,000,000.00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Rp300,000,000.00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	Rp9,386,520,000.00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	Rp9,386,520,000.00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	Rp9,386,520,000.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	Rp6,876,227,652.00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	Rp6,876,227,652.00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	Rp6,876,227,652.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp158,546,700,385.56
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp34,357,207,123.56
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp33,158,207,123.56
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp37,750,000.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp404,496,500.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2,880,495,013.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp29,695,000.00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp55,014,000.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp106,920,000.00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Rp136,400,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp1,524,284,755.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp35,930,000.00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Rp28,058,500.00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Rp4,200,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2,464,589,736.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3,601,207,080.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp63,390,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp931,849,791.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp90,825,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp1,666,597,095.56
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp1,116,950,999.00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	Rp72,290,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp158,200,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp308,932,189.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp2,471,921,963.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp1,927,769,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp3,784,667,500.00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp0.00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Rp1,180,682,218.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4,421,704,784.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp424,366,000.00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp198,000,000.00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	Rp10,000,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp2,411,270,000.00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp70,000,000.00





WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 17 -

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp100,000,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp70,000,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp69,750,000.00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp80,000,000.00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	Rp6,900,000.00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	Rp6,000,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp80,000,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rp127,100,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp1,199,000,000.00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Lainnya	Rp4,000,000.00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp480,000,000.00
5.1.02.01.04.0525	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	Rp500,000,000.00
5.1.02.01.04.0573	Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	Rp200,000,000.00
5.1.02.01.04.0652	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Rp15,000,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp64,813,593,301.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp46,654,353,215.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2,853,524,918.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp713,960,000.00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Rp42,075,000.00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp915,390,000.00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp733,375,000.00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Rp970,200,000.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	Rp3,282,650,000.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp574,950,000.00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Rp534,017,700.00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp283,800,000.00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Rp444,000,000.00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	Rp712,200,000.00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Rp77,400,000.00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp124,400,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp4,634,700,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp2,583,030,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp3,223,447,500.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp3,410,650,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp535,515,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp704,280,000.00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	Rp185,480,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp96,500,000.00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp331,500,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Rp65,000,000.00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp378,000,000.00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp1,444,900,000.00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Rp40,000,000.00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Rp317,102,497.00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp3,300,000.00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	Rp8,000,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp201,500,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp46,806,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp154,980,000.00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 18 -

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp4,178,367,600.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp1,002,390,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp458,593,000.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp44,168,000.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	Rp47,000,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp413,405,000.00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	Rp3,780,000,000.00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	Rp49,320,000.00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp1,656,360,000.00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Rp130,000,000.00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	Rp5,000,000.00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4,206,516,000.00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp38,600,000.00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Rp18,000,000.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp12,491,915,246.00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp1,916,000,000.00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	Rp9,085,720,000.00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	Rp951,776,000.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp160,740,000.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp197,532,984.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp39,432,642.00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp140,713,620.00
5.1.02.02.02.0011	Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN	Rp0.00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	Rp19,500,000.00
5.1.02.02.03.0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	Rp19,500,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp1,738,250,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp208,750,000.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp18,000,000.00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	Rp4,000,000.00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Rp18,500,000.00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Rp162,500,000.00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp1,227,500,000.00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	Rp99,000,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp3,069,984,000.00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rp107,500,000.00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	Rp6,000,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp784,213,000.00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp34,750,000.00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp682,500,000.00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Rp9,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp1,446,021,000.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp122,500,000.00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	Rp122,500,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp233,666,840.00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Rp12,066,840.00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	Rp221,600,000.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp0.00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	Rp0.00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	Rp73,800,000.00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	Rp73,800,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp345,000,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp195,000,000.00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	Rp150,000,000.00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp64,624,000.00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp616,000.00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 19 -

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp0.00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp13,440,000.00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp15,120,000.00
5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Rp35,448,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp11,405,399,856.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp8,175,710,249.00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	Rp40,000,000.00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	Rp191,609,840.00
5.1.02.03.02.0014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	Rp62,000,000.00
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	Rp20,000,000.00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Rp52,020,000.00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Rp2,000,000.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp3,478,090,000.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp332,000,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp1,445,850,409.00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Rp525,750,000.00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Rp227,000,000.00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Rp91,000,000.00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Rp50,000,000.00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp250,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp204,300,000.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp10,000,000.00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp62,600,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp270,140,000.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp1,000,000.00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp25,000,000.00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 20 -

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	Rp10,000,000.00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	Rp95,720,000.00
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	Rp2,000,000.00
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	Rp36,300,000.00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Rp276,000,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp289,080,000.00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp158,750,000.00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	Rp217,250,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp1,880,584,849.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp1,722,059,765.00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp0.00
5.1.02.03.03.0019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	Rp49,357,400.00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Rp109,167,684.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp1,349,104,758.00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	Rp350,000,000.00
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Rp95,000,000.00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	Rp556,343,000.00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	Rp3,120,000.00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Rp227,000,000.00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	Rp2,000,000.00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	Rp15,000,000.00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Rp100,641,758.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp19,578,886,850.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp19,578,886,850.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4,485,795,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,392,450,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp13,700,641,850.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp14,148,417,892.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp3,841,215,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp258,900,000.00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Rp1,645,800,000.00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	Rp1,858,195,000.00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Rp0.00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Rp20,000,000.00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	Rp58,320,000.00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 21 -

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp10,307,202,892.00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp9,710,577,892.00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Rp596,625,000.00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	Rp3,100,444,800.00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	Rp3,100,444,800.00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	Rp3,075,444,800.00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	Rp25,000,000.00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Rp4,460,395,804.00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Rp4,460,395,804.00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Rp4,460,395,804.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp6,682,354,759.00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp6,682,354,759.00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp6,682,354,759.00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp6,379,103,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp4,385,600,000.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp3,385,600,000.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp3,385,600,000.00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp1,000,000,000.00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp1,000,000,000.00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	Rp1,067,727,000.00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Rp1,067,727,000.00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Rp1,067,727,000.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp925,776,000.00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp925,776,000.00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp925,776,000.00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	Rp0.00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	Rp0.00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	Rp0.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp0.00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	Rp0.00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Rp0.00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Rp0.00
5.2	BELANJA MODAL	Rp47,545,787,603.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp6,236,145,403.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	Rp0.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	Rp0.00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	Rp0.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	Rp0.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp0.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp0.00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp0.00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Rp0.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp4,800,000.00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	Rp4,800,000.00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Rp4,800,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp2,209,806,133.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp650,100,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp650,100,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp1,555,706,133.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp416,000,000.00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 22 -

KODE 1	URAIAN 2	JUMLAH 3
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	Rp3,667,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp56,000,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp1,064,680,800.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	Rp15,358,333.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp4,000,000.00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	Rp0.00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	Rp4,000,000.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp185,967,200.00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	Rp163,179,200.00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp163,179,200.00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	Rp22,788,000.00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	Rp22,788,000.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp0.00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp0.00
5.2.02.08.05.0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja	Rp0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp1,314,244,666.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp967,884,666.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp106,233,333.00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp861,651,333.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp346,360,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp0.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp0.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp346,360,000.00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	Rp14,598,000.00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	Rp14,598,000.00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	Rp14,598,000.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Rp1,621,895.00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	Rp1,621,895.00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	Rp1,621,895.00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	Rp75,635,000.00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Rp75,635,000.00
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	Rp73,885,000.00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	Rp1,750,000.00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	Rp200,000,000.00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Rp200,000,000.00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	Rp200,000,000.00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	Rp467,876,000.00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	Rp467,876,000.00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	Rp467,876,000.00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp1,761,596,509.00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp1,761,596,509.00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp1,761,596,509.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp7,120,051,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp6,895,051,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp6,895,051,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp981,382,000.00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp1,111,009,000.00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp450,000,000.00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rp1,235,472,000.00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	Rp2,456,000,000.00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp661,188,000.00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp225,000,000.00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp225,000,000.00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp225,000,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp33,654,559,000.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp29,559,634,000.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	Rp29,559,634,000.00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	Rp28,109,634,000.00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	Rp1,450,000,000.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	Rp3,290,000,000.00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	Rp3,090,000,000.00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	Rp3,090,000,000.00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp200,000,000.00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 23 -

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Rp200,000,000.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	Rp235,000,000.00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	Rp40,000,000.00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Rp40,000,000.00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	Rp0.00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	Rp0.00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	Rp195,000,000.00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	Rp195,000,000.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	Rp519,925,000.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	Rp519,925,000.00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Rp519,925,000.00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp50,000,000.00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp50,000,000.00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp50,000,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp436,032,200.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	Rp0.00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp0.00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Rp0.00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	Rp0.00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	Rp436,032,200.00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	Rp436,032,200.00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	Rp386,032,200.00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	Rp50,000,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp99,000,000.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	Rp99,000,000.00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp99,000,000.00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	Rp99,000,000.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp1,500,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp1,500,000,000.00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	Rp1,500,000,000.00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	Rp1,500,000,000.00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	Rp1,500,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	Rp88,604,737,343.07
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp2,556,543,194.07
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp2,117,319,214.06
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Rp2,117,319,214.06
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Rp2,117,319,214.06
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp439,223,980.01
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp439,223,980.01
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp439,223,980.01
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp86,048,194,149.00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	Rp1,679,657,224.00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	Rp1,679,657,224.00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	Rp1,679,657,224.00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp84,368,536,925.00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp84,368,536,925.00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp41,027,669,000.00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	Rp43,340,867,925.00
	Jumlah Belanja	Rp665,680,718,682.00
	Total Surplus/(Defisit)	Rp0.00

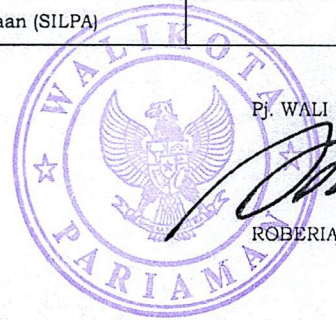


WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 24 -

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN DAERAH,  
BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	Rp0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	Rp0,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	Rp0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
	Pembiayaan Netto	Rp0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp0,00



Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA